

Sejarah Runtuhnya Rezim Muammad Qaddafi di Libya (2011-2020)

Nisa' Nadzrotun Nafidah

UIN Sunan Ampel Surabaya

nisanafida703@gmail.com

Ali Muhdi

UIN Sunan Ampel Surabaya

muhdi@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang dinamika runtuhnya rezim Muammar Qaddafi di Libya dari perspektif historis dengan menyoroti faktor politik, ekonomi, sosial, dan ideologis yang melatarbelakanginya. Selama lebih dari empat dekade kekuasaan, Qaddafi membangun sistem pemerintahan Jamahiriya yang diklaim berlandaskan kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam *The Green Book*. Kajian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan historis dan studi Pustaka serta teori yang digunakan yaitu teori otoritarianisme dari Juan J. Linz dan teori revolusi politik dari Theda Skocpol yang bertujuan untuk menelusuri sebab dari adanya gerakan untuk meruntuhkan Muammar Qaddafi secara faktor internal maupun eksternal, dan dampak dari kemunduran Muammar Qaddafi terhadap Libya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desakan untuk menurunkan Muammar disebabkan kebijakannya yang bersifat otoriter. Elemen masyarakat berdemonstrasi untuk menurunkan Qaddafi, sehingga Muammar diturunkan oleh masyarakatnya sendiri. Kemunduran Qaddafi tidak sepenuhnya membawa keberhasilan dan kemajuan Libya. Kegagalan Libya pasca-2011 mencerminkan lemahnya kesiapan institusional dalam menghadapi perubahan sistem pemerintahan. Dengan demikian, kejatuhan Qaddafi tidak hanya menandai berakhirnya rezim otoriter, tetapi juga membuka babak baru krisis struktural yang berkepanjangan di Libya.

Kata Kunci: *Arab Spring, Libya, Muammar Qaddafi, Otoritarianisme, Transisi Politik.*

PENDAHULUAN

Libya merupakan negara di kawasan Afrika Utara yang terletak di tepi Laut Tengah dengan Tripoli sebagai ibu kota. Dengan luas wilayah sekitar 680.000 mil persegi, Libya menempati posisi sebagai negara terluas keempat di Afrika. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas gurun pasir yang kurang produktif, kecuali beberapa kawasan seperti Tripoli, Jebel Akdar, dan Benghazi yang dikenal subur dan menjadi pusat pertanian. Secara geopolitik, posisi Libya yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania dan berdekatan dengan Sisilia serta Yunani menjadikan negara ini memiliki peran strategis dalam dinamika hubungan internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah (Muchtar dkk., t.t.).

Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1951, Libya berada di bawah

sistem monarki yang dipimpin Raja Idris I. Namun, pada 1 September 1969, revolusi militer yang dipimpin oleh Muammar Khadafi menggulingkan monarki tersebut dan mendirikan Republik Sosialis Rakyat Arab Libya (Jamahiriya). Sistem politik baru ini diklaim berlandaskan kedaulatan rakyat, antara lain melalui gagasan yang dituangkan Qaddafi dalam Buku Hijau (1975). Dalam praktiknya, rezim Qaddafi membawa kemajuan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya minyak, tetapi membatasi kebebasan politik dan menutup ruang demokrasi. Selain itu, kebijakan luar negeri yang radikal menjadikan Libya terisolasi dalam percaturan internasional. Kondisi politik otoriter tersebut berlangsung selama lebih dari empat dekade hingga memicu ketidakpuasan rakyat. Puncaknya, pada tahun 2011 terjadi revolusi besar yang menumbangkan rezim Qaddafi. Peristiwa ini tidak hanya menandai berakhirnya kekuasaan seorang pemimpin yang berkuasa selama 42 tahun, tetapi juga membuka fase baru dalam sejarah politik dan sosial Libya (Afriyenti & Humaidi, 2019).

Runtuhnya rezim Muammar Qaddafi pada tahun 2011 menjadi momentum penting dalam perjalanan politik Libya. Meski menandai berakhirnya pemerintahan otoriter yang berlangsung selama puluhan tahun, perubahan tersebut tidak menghasilkan stabilitas, melainkan memunculkan gelombang krisis politik dan sosial yang baru. Setelah kejatuhan Qaddafi, negara ini terjerumus dalam kekosongan kekuasaan, perebutan pengaruh antar kelompok bersenjata, serta persaingan dua pemerintahan yang berpusat di wilayah timur dan barat. Upaya perdamaian melalui pembentukan Government of National Accord (GNA) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 tidak berhasil mengakhiri konflik, karena lemahnya struktur kelembagaan, keterlibatan pihak asing, dan meningkatnya kesetiaan masyarakat terhadap kelompok suku maupun milisi lokal (Chivvis & Martini, 2014a). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kejatuhan Qaddafi tidak hanya menutup babak otoritarianisme, tetapi juga mencerminkan kegagalan proses transisi menuju sistem pemerintahan yang demokratis akibat warisan kekuasaan yang represif dan terpusat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji Baik Subkhana Adzim Baqi & Raka Zikrilah (2025) dalam jurnal “Dari Kerajaan Menjadi Republik: Transformasi dan Konfrontasi Kepemimpinan Raja Idris serta Kebijakan Muammar Khadafi di Libya Abad 20” menjelaskan transisi Libya dari monarki ke republik. Mereka menegaskan bahwa meskipun Qaddafi mengusung perubahan melalui sistem republik, praktik pemerintahannya justru mengarah pada otoritarianisme yang membatasi kebebasan politik. Muhammad Nur Irsyad Muchtar dkk. (2021) dalam artikel “Muammar Khadafi di Libya dan Pengaruhnya di Afrika Utara (1969-2011)” membahas transformasi politik dan sosial di Libya, termasuk implementasi The Green Book yang menolak sistem partai politik. Penelitian ini menilai kebijakan Qaddafi membawa modernisasi dan meningkatkan peran Libya di Afrika, tetapi juga memicu kontroversi dan konflik internal karena gaya kepemimpinan yang represif. Afriyenti dan Humaidi (2019) menyoroti perjalanan kekuasaan qaddafi sejak kudeta terhadap raja idris 1 hingga revolusi berdarah tahun 2011, yang menunjukkan bahwa kebijakan otoriternya menjadi factor utama kejatuhan rezim.

Kajian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan historis dan studi pustaka serta teori yang digunakan yaitu teori otoritarianisme dari Juan J. Linz yang menjelaskan tentang adanya keterbatasan pluralisme politik, minimnya partisipasi masyarakat dan dominasi personalistik pemimpin. dimana karakteristik tersebut terlihat jelas pada pola kepemimpinan muammar Qaddafi yang memusatkan kekuasaan pada diri sendiri dibawah konsep jamahiriyyah yaitu sebuah sistem yang diklaim sebagai demokrasi rakyat namun pada praktiknya menegaskan kontrol penuh negara atas masyarakat. dan teori revolusi politik dari theda Skocpol yang menjelaskan bahwa revolusi muncul dari kombinasi krisis negara dan mobilisasi sosial. Yang dimana dalam konteks Libya kombinasi antara lemahnya institusi negara, ketimpangan ekonomi, serta inspirasi gelombang *arabspring* menjadi faktor pendorong munculnya Gerakan revolusioner 2011 yang menggulingkan Qaddafi.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana latar belakang runtuhnya rezim Muammar Qaddafi, apa saja faktor yang mempengaruhi keruntuhan rezim Muammar Qaddafi. serta bagaimana dinamika pasca runtuhnya rezim Muamar Qaddafi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang runtuhnya rezim Muammar Qaddafi di libya, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keruntuhan rezim Muammar Qaddafi. serta untuk mengkaji kondisi libya setelah runtuhnya rezim Muammar Qaddafi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Runtuhnya Rezim Muammar Qaddafi

Keruntuhan negara Libya bermula dari masa pemerintahan Muammar Qaddafi. Selama lebih dari empat dekade berkuasa, kepemimpinan Qaddafi diwarnai oleh berbagai kontroversi, termasuk kegagalannya dalam membangun hubungan diplomatik yang stabil dengan negara-negara Arab maupun Eropa. Pada tahun 2011, gelombang protes pro-demokrasi yang dipicu oleh revolusi di Tunisia menyebar ke kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah, termasuk Libya. Di Libya, gelombang protes awal dipimpin oleh Fathi Terbil, seorang pengacara yang dikenal sebagai representasi keluarga korban tragedi Pembantaian Penjara Abu Salim pada tahun 1996.

Penangkapannya oleh aparat justru memicu perluasan aksi demonstrasi ke berbagai wilayah di Libya, yang berkembang menjadi tuntutan untuk mengakhiri rezim Qaddafi. Para demonstran menuntut pembebasan Terbil serta menegaskan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan bagi seluruh rakyat Libya (Hariyanti dkk., 2024). Pada malam yang sama, simbol-simbol kekuasaan Qaddafi, termasuk foto-fotonya yang sebelumnya digunakan oleh mahasiswa dalam kegiatan dukungan yang disponsori pemerintah, dihancurkan di ruang-ruang publik. Kantor-kantor komite revolusioner turut menjadi sasaran amuk massa. Para demonstran mengumandangkan slogan-slogan revolusioner, salah satunya “Ya Qaddafi barra barra, Libya hurra hurra,” yang bermakna “Qaddafi pergi, bebaskan Libya”(di Laurea, t.t.).

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Libya melakukan tindakan represif, termasuk pemutusan jaringan komunikasi dan penutupan saluran telepon nasional.

Tindakan ini mendapat kecaman keras dari komunitas internasional karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kebijakan represif ini semakin memperlemah stabilitas internal negara dan secara signifikan mengikis legitimasi politik Qaddafi. Sebelumnya, Qaddafi telah berhasil menggulingkan Raja Idris I dan memperkenalkan konsep pemerintahan baru berbasis Sosialisme Islam yang dikenal sebagai *Teori Universal Ketiga*. Teori ini merupakan gabungan dari ajaran Islam ortodoks, sosialisme revolusioner, dan nasionalisme Arab. Ia juga mengubah nama negara menjadi *Jamahiriyah Arab Libya Rakyat Sosialis*, sebagai simbol sistem pemerintahan yang diklaim menempatkan kekuasaan di tangan rakyat (Hariyanti dkk., 2024).

Namun, dalam implementasinya, relasi antara negara dan masyarakat justru memburuk akibat kecenderungan otoriter dalam kepemimpinan Qaddafi. Pembatasan terhadap kebebasan pers, meningkatnya kesenjangan sosial, serta praktik korupsi dan nepotisme yang meluas menjadi indikator memburuknya situasi politik dan sosial (Mughtar dkk., t.t.). Ironisnya, nilai-nilai demokrasi yang tertuang dalam *The Green Book*, yang menekankan bahwa kekuasaan sejati berada di tangan rakyat dan menolak sistem perwakilan seperti parlemen (Qaddafi, 2016), tidak diwujudkan dalam praktik.

Sebaliknya, rakyat tidak memiliki ruang partisipatif yang memadai untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pada mulanya, masyarakat enggan secara terbuka menentang kekuasaan Qaddafi. Namun, gelombang *Arab Spring* yang melanda berbagai negara Arab memberikan momentum bagi rakyat Libya untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap rezim. Konflik revolusioner yang berlangsung sejak Februari hingga Oktober 2011 berlangsung selama sekitar sembilan bulan. Durasi konflik yang panjang disebabkan oleh penolakan Qaddafi untuk mengundurkan diri dan memilih untuk bersembunyi dari publik. Pada akhirnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa rezim Qaddafi telah kehilangan legitimasi politik karena tidak lagi memperoleh kepercayaan dari rakyat Libya (Hariyanti dkk., 2024).

Faktor Yang Mempengaruhi Keruntuhan Rezim Muammar Qaddafi

Selama 42 tahun pemerintahan otoriter kolonel Muammar Qaddafi, Libya menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan politik yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Situasi ini semakin memburuk ketika munculnya gelombang Arab Spring yang mengguncang kawasan Timur Tengah, terutama setelah keberhasilan rakyat Tunisia dan Mesir menggulingkan rezim pemimpinnya. Keberhasilan tersebut mendorong rakyat Libya untuk melakukan hal serupa pada tahun 2011. Ketegangan meningkat akibat berbagai tindakan represif pemerintah, seperti penahanan aktivis hak asasi manusia, pembatasan akses internet, serta sikap Qaddafi yang dianggap arogan dan otoriter. Kondisi ini memunculkan kelompok oposisi yang kemudian mendapat dukungan dari negara-negara Barat (M dkk., 2020).

Dalam bidang politik, Libya menerapkan sistem pemerintahan Jamahiriyah atau “negara rakyat”, yang secara teoritis menempatkan kekuasaan di tangan rakyat

(Qaddafi, 2016). Namun, dalam praktiknya sistem ini justru melanggengkan kekuasaan otoriter di bawah kendali penuh Qaddafi. Ia memaksakan konsep demokrasi langsung versi pribadinya, sebagaimana tertuang dalam *Green Book*, yang dianggap sebagai pedoman utama kehidupan politik di Libya.

Dalam bidang ekonomi, Libya sebenarnya termasuk negara kaya karena memiliki cadangan minyak dan gas alam yang melimpah. Pada masa pemerintahannya, Qaddafi membangun infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, dan proyek besar saluran air bawah tanah dari utara menuju wilayah gurun (Hariyanti dkk., 2024). Namun, kebijakan ekonomi yang mengekang sektor swasta justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menasionalisasi perusahaan dan bank asing, sehingga hampir seluruh aktivitas ekonomi dikendalikan negara. Akibatnya, lapangan kerja terbatas, tingkat pengangguran meningkat, dan banyak tenaga kerja asing yang dipekerjakan karena masyarakat lokal dinilai kurang terampil. Ketimpangan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat, terlebih ketika hasil kekayaan minyak hanya dinikmati oleh Qaddafi, keluarga, dan pengikutnya (M dkk., 2020). Dalam *The Green Book*, Qaddafi menyatakan bahwa sistem kerja upahan merupakan bentuk perbudakan modern karena mempertahankan ketergantungan pekerja terhadap majikan (Qaddafi, 2016). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi negara justru memperlebar kesenjangan sosial dan memperkuat keresahan masyarakat.

Dalam aspek sosial dan ideologis, Qaddafi merebut kekuasaan melalui kudeta terhadap Raja Idris pada tahun 1969. Ia menghapus sistem monarki pro-Barat dan menggantinya dengan struktur negara sosialis yang anti terhadap pengaruh asing. Melalui ideologi yang ia sebut sebagai *teori universal*, Qaddafi memadukan nasionalisme Arab, sosialisme, dan konsep demokrasi rakyat. Meskipun menekankan identitas Islam sebagai dasar negara, kekuasaan tetap dipusatkan di tangan Qaddafi secara mutlak (M dkk., 2020). Kebijakan-kebijakan radikal diterapkan, seperti pengusiran komunitas Italia dan Yahudi, serta perintah kepada aparat intelijen untuk menindak para pengkritik rezim di luar negeri (Muchtar dkk., t.t.).

Tindakan nepotisme yang meluas dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi turut memperparah ketegangan antara negara dan masyarakat. Gabungan faktor internal dan eksternal mulai dari pengaruh *Arab Spring*, desakan masyarakat untuk memperoleh kebebasan politik, keterpurukan ekonomi, hingga intervensi asing akhirnya menjadi penyebab pecahnya revolusi pada tahun 2011. Aksi protes dimulai di kota-kota seperti Benghazi, Zintan, dan Al-Bayda, dan secara cepat menyebar ke berbagai wilayah lain. Pemerintah merespons dengan kekerasan, termasuk pengerahan militer dan serangan udara terhadap kelompok pemberontak. Tindakan represif ini menuai kecaman keras dari komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Sebagai bentuk perlawanan terorganisasi, kelompok oposisi membentuk Dewan Transisi Nasional (National Transitional Council/NTC) di Benghazi pada Februari 2011, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi politik dan militer. Menanggapi krisis tersebut,

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi

1973, yang menetapkan zona larangan terbang dan memberikan mandat bagi intervensi militer yang dipimpin NATO guna melindungi warga sipil. Intervensi internasional ini menjadi titik balik dalam konflik Libya dan berujung pada runtuhnya rezim Gaddafi, yang secara simbolis berakhir setelah kematiannya di Sirte pada akhir tahun 2011 (Muchtar dkk., t.t.).

Dinamika Pasca Keruntuhan Rezim Muammar Qaddafi

Kejatuhan Muammar Qaddafi pada 20 Oktober 2011 menjadi titik balik besar dalam sejarah politik Libya modern. Runtuhnya rezim yang telah berkuasa selama lebih dari empat dekade meninggalkan kekosongan kekuasaan yang kompleks bagi lembaga pemerintahan baru. Menurut laporan RAND Corporation yang disusun oleh Christopher S. Chivvis dan Jeffrey Martini (2014), fase awal setelah perang menunjukkan kegagalan dalam menciptakan keamanan dasar dan mengintegrasikan kelompok-kelompok bersenjata yang dulu berperan menggulingkan Qaddafi. Upaya untuk melakukan *disarmament, demobilization, and reintegration* (DDR), atau pengembalian kelompok bersenjata untuk Kembali menjadi Masyarakat sipil dan berintegrasi kembali dengan masyarakat, tidak berjalan efektif. Sehingga, ratusan kelompok militan justru mempertahankan senjatanya dan menguasai wilayah masing-masing (Chivvis & Martini, 2014b, hlm. 13–16).

Ketidakmampuan pemerintah yang baru dalam membangun otoritas tunggal, menyebabkan adanya ide untuk membentuk Dewan Transisi Nasional (NTC) yang bersifat sementara. Pada Juli 2012, NTC menggelar pemilu pertama pasca-Qaddafi untuk membentuk *General National Congress* (GNC). Menurut Frederic Wehrey (2021), lembaga legislatif ini gagal menjalankan fungsinya secara efektif karena tekanan politik dan militer dari kelompok Islamis serta faksi-faksi bersenjata lain yang menolak untuk tunduk pada pemerintahan pusat. Situasi ini menandai awal dari fragmentasi politik dan militerisasi masyarakat sipil yang semakin parah pada tahun-tahun berikutnya (Ġazāl & Hanssen, 2021, hlm. 667–669).

Pada tahun 2014, terjadi konflik politik yang mengakibatkan terbentuknya dua pemerintahan yang saling bersaing: pemerintah Tobruk dibawah Jenderal Khalifa Haftar yang memimpin *Libyan National Army* (LNA), dan pemerintah Tripoli yang dikuasai oleh koalisi kelompok Islamis. Dualisme pemerintahan ini memperdalam disintegrasi nasional dan menjerumuskan Libya ke dalam perang saudara yang berkepanjangan. Menurut laporan RAND, ketidakstabilan keamanan diperparah dengan masuknya kelompok jihadis dan al-Qaeda yang memanfaatkan kekosongan otoritas negara, khususnya di wilayah selatan dan barat Libya (Chivvis & Martini, 2014b, hlm. 24–26).

Pada bulan Desember 2015, Upaya perdamaian internasional mulai dilakukan melalui Perjanjian Skhirat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Government of National Accord (GNA). GNA merupakan lembaga pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Fayez al-Sarraj dan diakui secara resmi oleh komunitas internasional sebagai lembaga otoritas eksekutif. Tujuan pembentukan lembaga tersebut untuk menyatukan negara yang terpecah belah setelah konflik yang berkepanjangan. PBB

mengupayakan untuk menstabilkan Libya, mencapai gencatan senjata, dan mengakhiri perpecahan politik. Namun, GNA menghadapi perlawanan keras dari pasukan Haftar dan sekutunya di timur. Sekitar tahun 2016–2020, bentrokan bersenjata antara kedua kubu menyebabkan ribuan korban jiwa dan menghancurkan banyak infrastruktur vital, termasuk kilang minyak dan jaringan listrik nasional (Ġazāl & Hanssen, 2021, hlm. 670–674).

Dari sisi sosial-politik, Wehrey (2021) mencatat bahwa masa pasca-Qaddafi ditandai dengan erosinya kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat dan meningkatnya loyalitas kepada kelompok suku serta milisi lokal. Kondisi ini menyebabkan gagalnya upaya rekonsiliasi nasional dan memperkuat struktur sosial yang terfragmentasi. Hingga tahun 2020, Libya masih memiliki dua pemerintahan *de-facto*, yakni *Government of National Accord* (GNA) di Tripoli dan *House of Representatives* (HOR) di Tobruk yang masing-masing didukung oleh kekuatan asing, menjadikan konflik di Libya tidak hanya bersifat internal tetapi juga berimplikasi pada rivalitas geopolitik regional (Ġazāl & Hanssen, 2021, hlm. 675–680).

KESIMPULAN

Keruntuhan rezim Muammar Qaddafi pada tahun 2011 merupakan hasil dari proses panjang pemerintahan yang bercorak otoriter dan terpusat pada kekuasaan individu. Selama lebih dari empat dekade memimpin, Qaddafi membangun sistem politik Jamahiriya yang diklaim mewakili demokrasi rakyat, tetapi realitasnya menunjukkan praktik kekuasaan yang menekan kebebasan politik, membatasi partisipasi masyarakat, dan memperkuat dominasi personal. Kebijakan ekonomi yang tidak merata, korupsi, serta lemahnya diplomasi internasional memperdalam ketimpangan sosial dan menurunkan legitimasi rezimnya di mata rakyat.

Gelombang Arab Spring menjadi faktor eksternal yang mempercepat kejatuhan Qaddafi, ketika tuntutan rakyat terhadap keadilan dan kebebasan berubah menjadi revolusi nasional. Penindasan terhadap aktivis dan penggunaan kekuatan militer terhadap warga sipil memicu intervensi Dewan Keamanan PBB dan NATO, yang akhirnya menggulingkan kekuasaannya.

Pasca runtuhnya rezim, Libya menghadapi masa transisi yang penuh ketidakpastian. Kegagalan pemerintah baru dalam membangun otoritas tunggal, ketidakmampuan mengintegrasikan kelompok bersenjata, serta munculnya dua pemerintahan yang saling bersaing mencerminkan rapuhnya struktur negara pasca-Qaddafi. Kondisi ini menunjukkan bahwa berakhirnya pemerintahan otoriter tidak serta-merta menjamin lahirnya sistem politik yang demokratis dan stabil.

Dengan demikian, kejatuhan Qaddafi menandai akhir dari rezim otoriter yang mengakar kuat, sekaligus membuka babak baru krisis politik dan sosial di Libya. Pengalaman Libya menegaskan bahwa keberhasilan transisi menuju demokrasi membutuhkan kesiapan institusi negara, kepemimpinan yang inklusif, serta partisipasi masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyenti, A., & Humaidi, H. (2019). Muammar Khadafi: Kepemimpinannya Dari Awal Kudeta Tak Berdarah Hingga Revolusi Berdarah Di Libya (1969-2011). *PERIODE: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), Article 1.
- Chivvis, C. S., & Martini, J. (2014a). *Libya After Qaddafi: Lessons and Implications for the Future*. RAND Corporation.
- di Laurea, T. (t.t.). *Libya Before and After Gaddafi*.
- Ġazāl, A. N., & Hanssen, J. (2021). *The Oxford handbook of contemporary Middle Eastern and North African history*. Oxford University Press.
- Hariyanti, C. P. P., Porawouw, F. D., & Nabila, S. M. A. (2024). State Collapse: Government Failure in Gaddafi's Libya. *POPULIKA*, 12(2), 163–175. <https://doi.org/10.37631/populika.v12i2.1467>
- M, J. I. C., Septiani, K., & Diki, M. (2020). Faktor—Faktor Penyebab Kudeta Terhadap Kekuasaan Moammar Khadafi di Libya. *PERSPEKTIF*, 9(2), 338–345. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3654>
- Muchtar, M. N. I., Wati, F. W., Kabubu, R. D., & Malihu, L. (t.t.). *Muammar Khadafi di Libya dan Pengaruhnya di Afrika Utara*.
- Qaddafi, M. (2016). *The green book*. Createspace Independent Learning Platform.